

---

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Adin Syaifuddin<sup>1</sup>, I. Putu Widiantara<sup>2</sup>, Mega Trishuta Pathiassana<sup>3</sup>  
Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa<sup>1,2,3</sup>  
Corresponden Author : [adien.s82@gmail.com](mailto:adien.s82@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik tersebut dilihat dari faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah masyarakat untuk dapat mengakses sanitasi yang layak serta mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karya yang memiliki tugas dan fungsi penyediaan sarana prasarana air limbah, Bappeda, Dinas Kesehatan, UPTD PALD, Kelompok Swadaya Masyarakat dan masyarakat pemanfaat prasarana air limbah. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang didasari pada indikator teori implementasi kebijakan menurut model George Edwards III indikatornya terdiri dari 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi (Sikap Para Pelaksana) dan 4. Struktur Birokrasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya berjalan cukup baik. Kendala keterbatasan SDM serta kurangnya keikutsertaan keterlibatan masyarakat terhadap program pengelolaan air limbah domestik. Peneliti memberikan saran agar kinerja dari para pelaksana senantiasa dapat ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan sosialisasi pemahaman program Pengelolaan Air Limbah Domestik

**Kata kunci:** Implementasi Program, Pengelolaan Air Limbah Domestik

## Abstract

Research on the implementation of domestic wastewater management policies in West Sumbawa Regency aims to determine the extent to which the successful implementation of domestic wastewater management policies can be seen from the supporting factors and inhibiting factors.. This policy was made with the aim of increasing the number of people to be able to access proper sanitation and practice clean and healthy living behaviors. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The subjects of this research are the parties involved in the implementation of domestic wastewater management policies, namely Department of Public Works and Spatial Planning, Bappeda, Public Health Office, UPTD PALD, Non-Governmental Organizations and communities utilizing wastewater infrastructure. The instrument in this study is the researcher himself, which is based on the indicators of the theory of policy implementation according to the George Edwards III model. The indicators consist of 1. Communication, 2. Resources, 3. Disposition (Attitude of Implementers) and 4. Bureaucratic Structure. The data analysis technique used in this study is an interactive analysis technique according to Miles and Huberman. The result of this research is that in its implementation it runs quite well. Limited human resources and lack of community involvement in domestic wastewater management programs. Researchers provide suggestions so that the performance of the implementers can always be improved by evaluating and socializing the understanding of the Domestic Wastewater Management program

**Keywords :** Program Implementation, Domestic Wastewater Management

---

## A. PENDAHULUAN

Air limbah domestik merupakan jenis limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun contohnya seperti air buangan jamban, air buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha atau kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. Pengelolaan air limbah domestik tersebut memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan beberapa langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik yang ada di lingkungan masyarakat. Komitmen program pengembangan sanitasi yang berpihak masyarakat dalam pembangunan mulai dari Visi dan Misi Bupati Sumbawa Barat, yaitu "Terwujudnya Pemenuhan Hak – Hak Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong". Dengan visi ini diharapkan walaupun terjadi pergantian kepala daerah, komitmen tentang sanitasi tetap dipertahankan. Sebagai upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan,

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah yang memuat target akses universal pelayanan sanitasi 100% dalam rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat 2016 – 2021 serta melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dengan adanya pematkhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sumbawa Barat (SSK) dengan sasaran bidang sanitasi yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah Akses layak sebesar 100% dan akses aman sebesar 60% air limbah.. Berdasarkan data Laporan Status Sanitasi (LSS) sektor air limbah domestik Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020, yaitu 0% rumah tangga yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan

(BABS), sebesar 54% menggunakan SPALD setempat individual, SPALD skala komunal sebesar 4,88%, SPALD-T/permukiman berbasis masyarakat sebesar 1,55%. Selaras dan berjalannya kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat, faktor penghambat kebijakan juga akan muncul, faktor penghambat kebijakan berasal dari sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya peralatan. Sumber daya merupakan faktor penting bagi pelaksanaan kebijakan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya keuangan yang berkecukupan, serta terpeliharanya sumber daya peralatan tentunya akan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan dan pelayanan publik merupakan dua hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah (Handoyo, 2012). Dengan kata lain, kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan publik yang mungkin akan terjadi ataupun sudah terjadi dan pilihan tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, sumberdaya dan hal lainnya. Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan (Hayat, 2018). Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik atau bersama. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari apa yang diputuskan. Sementara wujud dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, apakah berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat dinamakan dengan pelayanan publik. Budi Winarno dalam Artini (2017), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan memiliki pengertian tentang

---

tahap dari sebuah proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Pengertian implementasi dipandang secara luas yaitu mempunyai makna pelaksanaan undang – undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan akan ditentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil membawa dampak dari tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Menurut Sitomurang (dalam Permatasari 2020), mengatakan bahwa keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Winarno (dalam Sugara 2017), menjelaskan bahwa implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Pada implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik tidak hanya hubungan komunitas dengan program yang sangat penting, namun juga hubungan antara komunitas dengan organisasi pelaksana program. Dalam implementasinya, program IPAL Domestik dikatakan berhasil jika output program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan IPAL Komunal apakah telah dijawab dengan keberadaan bangunan IPAL saat ini, hal ini berarti juga keberlangsungan program sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk menjawab itu, maka adanya kompetensi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Kerja sanitasi sebagai organisasi pelaksana sesuai dengan tugas program. Hal tersebut didasarkan pada tuntutan masyarakat sebagai pemanfaat IPAL kemudian KSM menyesuaikan dengan

keputusan bersama yang telah disepakati bersama masyarakat.

## **2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

### **a. Komunikasi.**

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama, yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua, yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga, yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

### **b. Sumber Daya**

Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas- tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

### **c. Disposisi /Sikap**

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka

---

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-

badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6) Kecenderungan para pelaksana (*implementors*).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

### 3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam Urrahmi *et al.*, (2020), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegangperan yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

#### 4. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan mengenai air limbah di Indonesia sudah tertuang dalam PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Dalam peraturan tersebut, pengertian air limbah adalah air dari sisa suatu hasil kegiatan ataupun suatu usaha yang berasal dari suatu aktivitas kehidupan sehari – hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan – bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair domestik (domestic wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan, komersil dan perkantoran. Misalnya yaitu: air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja. Limbah cair yang tidak ditangani atau diolah dengan baik maka dapat menimbulkan dampak yang besar bagi pencemaran lingkungan serta

dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Selain itu, limbah cair domestik biasanya tidak terlalu diperhatikan dengan baik, padahal kalau dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu lama dapat menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, limbah air deterjen sisa cucian apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan menjadi sumber pencemaran lingkungan yang dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Tangga yang dimaksud dengan air limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Pada air limbah rumah tangga non septik tank biasanya mengandung partikel-partikel koloid yang dapat mengakibatkan adanya kekeruhan. Kandungan zat-zat kimia yang terkandung dalam air limbah rumah tangga sangat tergantung pada sabun, deterjen, dan pengharum baju. Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya peningkatan pemakaian air dalam rumah tangga yang menyebabkan peningkatan jumlah limbah cair. Sumber air limbah diungkapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah Kabupaten/Kabupaten, sehingga diperlukan pengaturan sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah, merupakan pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia

---

usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan secara terpadu, efisien dan efektif. Pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan pengolah air limbah terpusat. Sistem pengolahan air limbah setempat merupakan system pembuangan air limbah domestik ke dalam septik tank individual atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sedangkan untuk sistem pengolahan air limbah terpusat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

Air limbah domestik perlu penanganan untuk menghindari permasalahan pencemaran lingkungan khususnya air dan tanah. Permen PUPR No.4/2017 mendefinisikan SPALD sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penanganan pada penyaluran air limbah domestik ada dua jenis, yaitu sistem terpusat (off site) dan setempat (on site) (Adi et al., 2016)

Prihandrijanti dan Firdayati dalam Afandi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengelolaan terpusat/komunal lebih sesuai diterapkan di kota-kota di Indonesia karena di samping lebih menguntungkan dari sisi pengoperasian dan perawatan, juga menjadi solusi bagi daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang meliputi penyaluran serta pengolahan air limbah domestik, berupa grey water dan black water. Pada perencanaan ini, penyaluran air limbah didesain terpisah dengan air hujan dengan tujuan mengurangi resiko

kontaminasi air limbah pada tubuh manusia (Pratiwi & Purwanti, 2015).

## 5. Peran Serta Masyarakat

Penyelenggara layanan publik berkewajiban dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya (Razak, 2013). Peran serta masyarakat adalah proses ketika individu dan keluarga dan serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk swasta bertanggung jawab atas kesejahteraan kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam melibatkan masyarakat dan pihak yang lain, harus mengedepankan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah mufakat, serta memperhatikan keberagaman. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengenalan masalah dan penentuan prioritas masalah, serta bertanggung jawab dalam perencanaan, maupun turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta penilaian (Sabardi, 2014). Pada dasarnya peran serta masyarakat yang ideal adalah mencakup semua tahap, mulai tahap pengenalan masalah hingga tahap penilaian dan pemantapan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah yaitu keadaan dimana keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengenalan masalah, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan air limbah. Berikut beberapa peran serta masyarakat yang harus dilakukan antara lain peran serta perorangan dan keluarga, yaitu keluarga yang mampu secara ekonomi dapat membangun sarana

---

pengelolaan air limbahnya secara mandiri, baik pembangunan jamban dengan leher angsa maupun tangki septiknya, peran serta masyarakat umum, yaitu para kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun infrastruktur pengolahan air limbah domestik skala komunal, baik itu WC, tangki septik komunal, maupun IPAL komunal, lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu dapat berperan serta dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat maupun memberikan bantuan untuk pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau dibawah rata – rata, pihak swasta, yaitu dapat membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan dukungan program pengelolaan air limbah domestik, baik setempat maupun terpusat.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nur'arif (2008), mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dianalisis untuk mengetahui partisipasi masyarakat, kelembagaan, peraturan dan kebijakan pemerintah, pembiayaan dan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa di Kota Praya belum terdapat peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik dan kinerja pemerintah yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah domestik yang mengancam tercemarnya sumber daya air di Kota Praya. Di tingkat pemerintah kelembagaan pengelolaan air limbah domestik belum melaksanakan tupoksi sesuai dengan yang diberikan sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan antara instansi yang satu dengan yang lain. Keterkaitan penelitiannya memiliki kesamaan dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu dapat dilihat pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,

kemudian perbedaannya terletak pada teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang melakukan pendekatan analisis SWOT

## **C. METODE**

### **1. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) Kabupaten Sumbawa Barat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) IPAL Lamusung dan Lampok, dan Masyarakat pemanfaat IPAL Lamusung dan IPAL Lampok

### **2. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga data yang dikumpulkan berupa data deskriptif

### **3. Analisis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan validasi sebelum terjun ke lapangan penelitian dengan melakukan persiapan meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif deskriptif dan penguasaan teori mengenai objek yang diteliti yaitu implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Peneliti terjun ke lapangan sesuai dengan obyek dan tempat yang telah direncanakan yaitu ke Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat Bidang Cipta Karya, Dinas Kesehatan

---

Kabupaten Sumbawa Barat, UPTD PALD, KSM IPAL Lamusung, KSM IPAL Lampok, masyarakat penerima manfaat IPAL Lamusung dan IPAL Lampok untuk melihat dan mengamati pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik secara langsung. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, buku catatan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Data primer diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini pada Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat Bidang Cipta Karya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, UPTD PALD, KSM dan masyarakat penerima manfaat IPAL Lamusung dan IPAL Lampok untuk mendapatkan informasi langsung mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu, Batas-batas wilayah administratif; data penduduk, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan data SPALD-S SPALD-T yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi pada Bappeda, Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, Dinas Kesehatan, UPTD PALD, KSM dan masyarakat penerima manfaat IPAL Lamusung dan IPAL Lampok yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya menyajikan data implementasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya kesimpulan dan verifikasi

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 2 (dua) macam pengelolaan air limbah yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur pemerintah dalam mengolah air limbah permukiman masyarakat yang diolah pada satu tempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pembangunan Tangki Septik individual yang dibangun pada satu rumah tangga dengan pengelolaan setempat yang tidak termasuk dalam jaringan layanan IPAL komunal. Tangki septik ini selanjutnya dilakukan penyedotan lumpur tinja untuk di buang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Faktor penghambat lainnya dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat adalah belum adanya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diharapkan menjadi suatu wadah masyarakat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar masyarakat maupun antar pelaksana kebijakan. Kurangnya dukungan dan komitmen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan menjadikan kebijakan pengelolaan air limbah domestik ini tidak dapat terimplementasikan dengan baik sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan itu dibuat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat bahwa pemahaman masyarakat tentang air limbah domestik hanya terbatas pada dampak yang dapat dilihat dan dirasakan secara visual dan seketika, seperti menimbulkan bau, membuat lingkungan kotor dan sebagai tempat berkembangnya nyamuk. Sementara dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air tanah dan air permukaan hanya sebagian kecil yang mengetahui. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemahaman



---

masyarakat tentang air limbah domestik terkait dengan dampaknya terhadap pencemaran air masih rendah. Tetapi di sisi lain masyarakat kelihatan cukup kritis melihat perhatian pemerintah terhadap keberadaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagian besar masyarakat merasa prihatin terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini merupakan sebuah potensi yang dapat dijadikan *entry point* bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber atau informan penelitian di atas, maka peneliti mencoba menyimpulkan bahwa berkaitan dengan kecukupan sarana dan sarana penunjang dalam program pengelolaan dan penyediaan air limbah dan sanitasi lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat masih kurang terpenuhi seperti misalnya jumlah rumah tangga yang masih menginginkan pemasangan tangki septik maupun sambungan baru pada jaringan ipal komunal.

Dari hasil wawancara, observasi dan analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dapat dijelaskan melalui empat macam indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat penerima manfaat cukup terjalin baik. Untuk itu, koordinasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan maupun manfaat dari program pengelolaan air limbah domestik perlu ditingkatkan atau dioptimalkan.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat sangat baik, setiap tahun dilakukan penganggaran yang berasal dari dana APBD, Dana Alokasi Khusus dan dana Hibah. Kabupaten Sumbawa Barat sudah memiliki prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik 28 unit, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 1 unit dan kendaraan penyedotan tinja 4 unit.

### **3. Disposisi**

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki disposisi yang cukup baik, dapat dilihat dari dukungan dan komitmen yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat melalui pengawasan, monitoring dan evaluasi program pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat cukup jelas dan baik dengan pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang dan UPTD PALD selaku operator pengelola air limbah domestik. Struktur birokrasi dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :

#### **1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik adalah adanya ketersediaan sarana prasarana pengelolaan air limbah, Sumber daya anggaran setiap tahun dilakukan penganggaran yang berasal dari dana

---

APBD, Dana Alokasi Khusus dan dana Hibah.

## 2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :

- a. Kurangnya dukungan dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam dalam hal operasional dan pemeliharaan prasarana air limbah, sehingga menjadikan kebijakan pengelolaan air limbah domestik ini tidak dapat terimplementasikan dengan baik sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan.
- b. Kurangnya Sumber daya pengelola atau petugas yang melakukan monitoring keberfungsian prasarana air limbah, sehingga pengelolaan air limbah domestik tidak optimal.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan analisis kondisi pengelolaan air limbah di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi penyebab permasalahan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Sumbawa Barat guna mewujudkan tujuan yang diinginkan diantaranya sebagai berikut :

1. Peran aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam kesinambungan sarana yang ada dengan membentuk kader lingkungan sebagai kelompok pengelola pemanfaat. Di Kabupaten Sumbawa Barat bisa menunjuk Agen Gotong Royong (peliuk) sebagai Kader Lingkungan. Adapun tugas dari Kader Lingkungan antara lain menyusun rencana kerja terkait pengoperasian dan pemeliharaan jaringan IPAL maupun tangki septik

individu, turut serta mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memelihara IPAL Komunal maupun tangki septik individu, menampung keluhan masyarakat mengenai kendala teknis yang terjadi dan melakukan kampanye kesehatan.

2. Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang tarif retribusi penyedotan air limbah domestik termasuk Perizinan pembuangan air limbah domestik dan penerapan sanksi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD PALD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan tupoksi pengelola air limbah domestik.
4. Menetapkan standar operasional pemeliharaan prasarana air limbah yang ditujukan untuk para pengguna fasilitas dan juga operator yang bertugas pada IPAL Komunal. SOP (Standart Operating Procedure) ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat sama - sama disiplin dan bertanggung jawab atas fasilitas yang ada karena fasilitas tersebut milik bersama dan untuk kepentingan bersama.

Adapun rekomendasi peneliti sebagai alternatif yang dapat diambil dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

1. Membentuk Kader Lingkungan melalui Agen Gotong Royong yang bertugas menyusun rencana kerja pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah turut serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memelihara prasarana air limbah, menampung keluhan masyarakat mengenai kendala teknis yang terjadi dan melakukan kampanye kesehatan.
2. Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang tarif retribusi penyedotan air limbah domestik termasuk Perizinan

- 
- pembuangan air limbah domestik dan penerapan sanksi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD PALD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan tupoksi pengelola air limbah domestik.
  4. Menetapkan standar operasional pemeliharaan prasarana air limbah sehingga semua pihak sama - sama bertanggung jawab atas fasilitas yang ada karena fasilitas tersebut milik bersama dan untuk kepentingan bersama.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah bahwa dalam implementasinya berjalan cukup baik. Kendala keterbatasan SDM UPTD PALD selaku operator pengelola air limbah domestik serta kurangnya keikutsertaan keterlibatan masyarakat terhadap program pengelolaan air limbah domestik. Peneliti memberikan saran agar kinerja dari para pelaksana senantiasa dapat ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan sosialisasi pemahaman program Pengelolaan Air Limbah Domestik.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa masalah yang belum bisa dipecahkan. Sehingga peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan program pengelolaan air limbah domestik, instansi terkait Kabupaten Sumbawa Barat agar menyusun rencana strategis serta melakukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran program air limbah.
- b. Masyarakat sebagai pemanfaat atau pengguna seharusnya menyadari dan memanfaatkan dengan baik fasilitas prasarana yang sudah terbangun saat ini, sehingga program pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dimaksimalkan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Y. V., Sunoko, H. R., & Kismartini, K. (2014). Status Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal Berbasis Masyarakat Di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(2), 100. <https://doi.org/10.14710/jil.11.2.100-109>
- Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*.
- Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2, 78–91.
- Artini, Y. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Yogyakarta Melalui Program Sanitasi Lingkungan Berbasis .... *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*. <http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/38>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dunn William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September*.
- IUWASH Plus (2016). *Saatnya Sekarang! Layanan Lumpur Tinja Terjadwal*. Jakarta : USAID Dari Rakyat Amerika.
- Kaunang, Septya.2011. Makalah Pengolahan Air Limbah. Diakses di<http://www.slideshare.net/septyazee/makalah-pengolahan-air-limbah> pada 02 Maret 2015.
- Kementerian Kesehatan (2011). Seri Sanitasi Lingkungan. In D. J. Kesehatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem Biofilter

- 
- Anaerob Aerob Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana
- Laila. (2021). *Pengertian Limbah Domestik & Contoh Limbah*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/limbah-domestik/>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Mende, J. C. C., Kumurur, V. A., & Moniaga, I. L. (2015). Kajian Sistem Pengelolaan Air Limbah Pada Permukiman Di Kawasan Sekitar Danau Tondano (Studi Kasus: Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa). *Sabua*, 7(1), 395–406.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur'arif. 2008. *Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)*. Laporan Penelitian. Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Muhamamad Yuda Pranata,dkk., 2012. Studi Identifikasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Untuk Wilayah Kecamatan Ngaliyan, Tugu, Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan UNDIP*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Prabowo, Achmad Taufik. 2014. Makalah pengelolaan limbah rumah tangga. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro:Universitas Lampung.
- Pratiwi, R. S., & Purwanti, I. F. (2015). Perencanaan sistem penyaluran air limbah domestik di Kelurahan Keputih Surabaya. *Jurnal Teknik Its*, 4(1).
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.